

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia masa kini, memperbaiki keadaan materi adalah cara untuk meningkatkan nasib hidup seseorang. Indonesia merupakan salah satu negara yang berjuang untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga sering mengalami krisis ekonomi yang berujung pada tingginya angka pengangguran dan berkurangnya prospek kerja.

Kemiskinan sendiri pada dasarnya merupakan persoalan yang telah lama ditemui bahkan sudah ada sejak jaman dahulu; Hingga saat ini, permasalahan kemiskinan sulit bahkan belum pernah ditemukan solusinya. Kemiskinan merupakan permasalahan masyarakat yang selalu menarik untuk terus diteliti di Indonesia khususnya dikalangan akademisi. Hal ini disebabkan karena kemiskinan sudah menjadi permasalahan sejak lama dan masih menjadi permasalahan di masyarakat kita hingga saat ini, dikarenakan juga krisis ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia yang dapat memperburuk situasi ini (Safarit, 2014)

Pengangguran menjadi salah satu penyebab pemerintah belum mampu meningkatkan pendapatan yang mana hal itu bisa untuk memerangi kemiskinan yang semakin banyak melanda masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kelas bawah, sehingga dengan ini pemerintah belum mampu membangun perekonomian negara, termasuk menciptakan lapangan kerja secara umum. Karena keadaan ini seperti ini, penduduk desa lebih cenderung untuk memilih berpindah ke kota dlam

upaya meningkatkan taraf hidup mereka. Kurangnya pengalaman pendidikan dan keterampilan menjadikan mereka lebih sulit mendapatkan pekerjaan dan terhindar dari kemiskinan. Meski rumit, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 mengatur bahwa setiap orang atau warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang manusiawi (Rahmadani, 2020).

Kebanyakan orang, jika melihat gelandangan dan pengemis akan merasa kasihan karena sulitnya kehidupan yang kadang-kadang mereka jalani. Hal ini berarti bahwa orang-orang yang pindah dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan yang layak tidak dapat memperoleh pekerjaan, bahkan keinginan mendapatkan pekerjaan itu jauh dari apa yang mereka inginkan dengan kata lain mereka tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Untuk mendapatkan penghasilan guna membayar pengeluaran sehari-hari untuk kebutuhan hidup yang semakin meningkat, mayoritas dari mereka yang mengambil keputusan untuk memilih profesi atau bekerja menjadi gelandangan dan pengemis. Mereka mengumpulkan uang dengan berjalan kaki dari toko ke toko, di setiap persimpangan lampu merah, di tempat keramaian (pasar), dan di mana pun mereka bisa guna mendapatkan uang (Rahmadani, 2020).

Maraknya permasalahan mengemis ini merupakan konsekuensi dari kemiskinan yang disebabkan oleh tekanan ekonomi dan tantangan dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Jika dilihat dari pengukuran capaian pembangunan, fenomena ini jelas bukan hal yang baik bagi pembangunan di suatu negara karena menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk di negara ini masih mempunyai permasalahan. Namun karena berdampak pada kepentingan

banyak orang (penduduk kota) yang menganggap keberadaan pengemis tersebut telah mengganggu kesehariannya, maka mengemis merupakan sebuah fenomena sosial yang muncul di perkotaan telah berkembang menjadi permasalahan masyarakat secara luas.

Ternyata permasalahan kemiskinan yang ada di Kota Bandung serupa dengan yang menimpa sebagian masyarakat perkotaan yang akhirnya menjadi gelandangan dan mengemis karena harus menghidupi keluarganya. Rendahnya status sosial ekonomi yang dialami oleh mereka (kemiskinan) menjadi penyebab hal ini, sehingga akhirnya memaksa mereka bekerja sebagai gelandangan dan pengemis di jalanan hanya demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (Mukama, 2016).

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) menjadi fokus perhatian pemerintah di Kota Bandung. Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa para gelandangan dan pengemis tidak diperbolehkan untuk melakukan segala aktivitas di jalan karena dapat mengganggu fasilitas umum, estetika, bahkan dapat mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya (Yuni Mulyati, 2023).

Gepeng merupakan orang yang melakukan aksi-aksi jalanan seperti manusia berkostum badut yang beratraksi di jalanan, seorang ibu-ibu yang membawa anak kecil berpakaian compang-camping, anak jalanan berpakaian compang-camping dengan kemoceng dan masih banyak yang lainnya.

Dapat dikatakan bahwa gependeng merupakan fenomena sosial yang terus menerus ada khususnya di wilayah metropolitan dan merupakan kejadian permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meski memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, namun kualitas sumber daya manusia di Kota Bandung ini buruk bahkan permasalahan lainnya adalah distribusi penduduk yang tidak merata antar wilayah, tentunya hal ini juga akan menjadi tantangan tersendiri (Yuniarti, 2013).

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Bandung, gelandangan dan pengemis terdaftar pada tahun 2018 berjumlah 88 orang, kemudian mengalami kenaikan sebesar 70% pada tahun 2019, yaitu menjadi 297 orang. Pada tahun 2020 gelandangan dan pengemis diperkirakan mengalami lonjakan yang cukup tinggi imbas dari Covid-19, menurut data Dinas Sosial Kota Bandung, terjadi lonjakan PPKS di Kota Bandung selama COVID-19. Menurut Dinas Sosial Kota Bandung, kenaikan PPKS sebesar 25% dengan fokus khusus pada gelandangan, sedangkan menurut data terbaru tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS. Selain itu, Dinas Sosial juga menjerat 227 PPKS saat dilakukan patroli dan gelandangan berkorelasi kuat dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Bandung. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung melaporkan pada awal Maret 2021 terdapat Sebanyak 3.000 orang di Bandung dikabarkan menjadi miskin akibat wabah COVID-19. Salah satu tantangan sosial yang dihadapi Kota Bandung adalah gelandangan yang semakin hari semakin banyak (Diskominfo, 2023).

Diakui Dinas Sosial Kota Bandung bahwa upayanya mengelola Pemerintahan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung terkendala oleh kekurangan dana, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. PPKS yang kerap bermanifestasi sebagai gelandangan semakin sulit dilawan pihaknya karena hal tersebut. diakui saat itu Tahun Baru dan Natal 2021. Di Bandung, jumlah gelandangan kini mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena lonjakan PHK di perusahaan-perusahaan selama wabah Covid-19 menjadi penyebab kenaikan ini, kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap hal tersebut. Karena luasnya wilayah Kota Bandung, maka dalam penanganan gelandangan mereka akan berkolaborasi dengan lembaga terkait seperti Satpol PP dan daerah di 30 kecamatan (Diskominfo, 2023).

Soni Bakhtiyar dikenal sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Bandung memberikan pernyataan dalam bahwa terdapat sembilan tempat yang banyak ditemukan PPKS tersebut adalah simpang Istana Plaza (Jalan Padjadjaran), Pasirkoja, Jalan LLRE Martadinata (Riau), Jalan Gatot Subroto, Jalan Mohamad Toha dan Jalan Astana Anyar, Jalan Asia Afrika, Jalan Leuwipanjang dan jalan sekitar Alun-Alun Bandung (Aurellia, 2023). Terdapat beberapa pengemis yang beraktivitas di kawasan tersebut, mulai dari usia muda hingga orang tua. Mereka memohon dengan berbagai cara; beberapa menggunakan cacat tubuh atau bekas luka, dengan menggendong anak kecil mereka, mereka mungkin membuat orang merasa tidak enak atau iba saat melihatnya.

Padahal tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Muhtar, 2022).

Hal demikian juga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis disebutkan bahwa permasalahan tersebut tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu diperlukan upaya pembangunan. Proyek ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen agar mereka dapat mencapai taraf hidup dan penghidupan yang terhormat sebagai warga negara Indonesia.

Selanjutnya dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial) bahwa tujuan perjuangan bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sehat secara jasmani dan rohani serta menjunjung tinggi harkat dan martabat, hak asasi manusia serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Tujuan mulia ini hanya akan dapat dicapai jika terdapat kolaborasi yang baik antara masyarakat dan negara sehingga mencapai posisi ideal berada dalam kondisi terbaik, komprehensif, dan adil (Rahmadani, 2020).

Terbukti bahwa Indonesia merupakan negara berkembang yang banyak dikaitkan dengan kemiskinan, tiap-tiap kota mempunyai wilayah yang perumahannya penuh sesak, terdapat banyak pengamen jalanan, pengemis, dan anak-anak yang hidup di jalanan, dan beberapa fenomena yang merupakan beberapa indikator kemiskinan perkotaan lainnya. Bahkan banyak orang tidur di warung pinggir jalan pada malam hari. Penyakit ini cukup memprihatinkan dan harus ditangani sekarang juga (Yuniarti, 2013).

Mereka yang menggelandang dan bergantung pada mengemis untuk bertahan hidup secara kasar dapat dibagi menjadi dua kelompok: mereka yang tidak memiliki tempat tinggal dan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan pengemis karena malas dalam bekerja. Karena mereka dipermalukan atau takut dipulangkan ke rumah mereka, gelandangan dan pengemis biasanya tidak memiliki kartu identitas, dan pejabat pemerintah kota setempat tidak mengakui penduduk yang tidak memiliki kartu identitas sebagai warga negara. Oleh karena itu, kohabitasi (hidup bersama di luar nikah) sering kali digunakan untuk merujuk pada perkawinan yang dilakukan tanpa menggunakan persyaratan hukum. Akibat tidak adanya akta kelahiran, keturunan mereka menjadi generasi yang tidak yakin dan tidak puas akibat praktik ini akibat putusnya hubungan mereka dengan kerabat di pedesaan (Rahmadani, 2020).

Salah satu kelompok yang terpinggirkan dari kemajuan adalah para gelandangan dan pengemis, namun mereka juga memiliki gaya hidup yang berbeda dibandingkan masyarakat lainnya. Mereka menempati kawasan kumuh perkotaan sebagai tempat mereka tinggal, para gelandangan dan pengemis pun tak

lepas dari berbagai stigma yang diasosiasikan dengan lingkungannya sebagai kelompok marjinal. Stigma yang beredar di masyarakat pada saat ini secara tidak langsung telah memberikan kesan yang buruk terhadap gelandangan dan pengemis. Persepsi masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis mencakup label seperti sampah masyarakat, menjijikan, sumber kejahatan, tidak dapat dipercaya, tidak terorganisir, penipu, pencuri kecil, malas, apatis, dan tidak bisa dipercaya.

Gelandangan dan pengemis pada umumnya dikategorikan sebagai masyarakat kelompok kelas bawah yang pekerjaan rutinnnya adalah meminta belas kasihan berupa uang ditempat umum. Mengemis bukan lagi sekedar fenomena sosial masyarakat miskin; bagi yang lain, sekarang ini menjadi sarana penghidupan atau dengan kata lain profesi. Jadi, mengemis tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan kotor. Secara tidak langsung, generasi masyarakat akan terus mengemis jika dijadikan sumber pendapatan (Ayu, 2017).

Sejak mengemis menjadi bagian dari budaya, budaya kemiskinan muncul di kalangan gelandangan dan pengemis. Budaya Kemiskinan mengacu pada suatu bentuk kemiskinan yang tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi tetapi juga pada kekurangan dalam susunan budaya dan psikologis individu atau komunitas, yang dapat menyebabkan kecenderungan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kecenderungan ini memiliki ciri-ciri tersebut antara lain tidak produktif, tidak kreatif, tidak menabung, dan menggantungkan hidupnya pada orang lain. Budaya kemiskinan, sebagaimana didefinisikan oleh Lewis, adalah cara terbaik untuk hidup dalam situasi ini (Sudi, 2017).

Gambaran Lewis mengenai budaya kemiskinan sangat akurat jika dibandingkan dengan keadaan yang dihadapi para gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya berdasarkan bukti sejarah, kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh keadaan finansial; hal ini juga diakibatkan oleh perasaan malas, pasrah, dan menerima kenyataan yang ada (Sudi, 2017). Oleh karena itu, peneliti akan mengkaji kemiskinan pada gelandangan dan pengemis di Kota Bandung dengan teori budaya kemiskinan Lewis.

Cara-cara yang digunakan para pengemis untuk bertahan hidup memberikan gambaran mengenai budaya mengemis dan menunjukkan bagaimana mereka menghadapi kesulitan keuangan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun tak dipungkiri ada sebagian dari mereka yang melakukannya sebagai sarana profesi, dan bagi sebagian pengemis, hal itu sudah menjadi kebiasaan. Mereka terlalu malas untuk melakukan pekerjaan yang layak, sehingga mereka memilih untuk mengemis untuk menambah penghasilan tanpa melakukan upaya yang berat. Mereka hanya mengenakan pakaian lusuh yang tidak pantas untuk menarik kasih sayang orang lain, dan mereka menggunakan perlengkapan tambahan untuk penampilan mereka sebagai pengemis.

Gelandangan dan pengemis melakukan tindakan atau perilaku sosial di mana mereka berusaha membangkitkan simpati pengunjung untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar sehingga mereka dapat memperoleh uang dengan mudah. Melalui cara mereka memperoleh uang, baik yang etis maupun tidak jujur (seperti curang), mereka berhubungan dengan orang lain (Sari, 2016).

Meskipun fenomena kemiskinan merupakan sebuah permasalahan pembangunan yang memiliki banyak perspektif dan selalu berkaitan dengan aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, bahkan politik, akan tetapi penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengkaji dan mengungkap bagaimana konstruksi budaya mengemis ini tercipta yang bahkan selama ini selalu dikaitkan dengan kemiskinan dari aspek-aspek ekonomi saja, padahal kemiskinan juga dapat dilihat dari persepektif lain yakni mental dan budaya individu (Mahfudz, 2018).

Penelitian ini terbilang unik karena mengkaji tentang profesi pengemis yang dilakukan para gelandangan dan pengemis secara tekun di Kota Bandung bahkan diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu mereka, dengan realita ini melahirkan budaya kemiskinan dengan menjadikan gelandangan dan mengemis menjadi sebuah profesi yang normal dilakukan padahal realita tersebut bertentangan dengan norma yang ada saat ini. Sehingga dengan keadaan inilah yang menjadi alasan mengapa penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai **“KONSTRUKSI BUDAYA KEMISKINAN DALAM FENOMENA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA BANDUNG”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan merujuk kepada penjelasan latar belakang yang telah diberikan, penelitian ini berfokus pada analisis lebih lanjut membahas mengenai bagaimana konstruksi budaya kemiskinan dalam perspektif gelandangan dan pengemis di Kota Bandung, selain itu juga bagaimana jaringan sosial gelandangan dan pengemis untuk melanggengkan budaya kemiskinan pada gelandangan dan pengemis di Kota Bandung. Sehubungan dengan itu, peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan penelitian yang dapat dibagi menjadi:

1. Lapangan pekerjaan yang tidak merata menimbulkan urbanisasi besar-besaran masyarakat desa ke kota, sehingga menimbulkan kepadatan dan pengangguran di perkotaan.
2. Pengangguran di perkotaan menyebabkan banyaknya gelandangan dan pengemis akibat persaingan lapangan kerja yang timpang antara pekerja dan lapangan pekerjaan.
3. Gelandangan dan pengemis di Kota Bandung menjadikan aktivitas meminta-minta sebagai sebuah profesi, bahkan profesi mengemis ini diturunkan ke generasi yang akan datang sehingga lahirnya budaya kemiskinan.
4. Gelandangan dan pengemis di Kota Bandung ini merasa nyaman dengan kondisi yang dialami yakni menghasilkan uang tanpa bekerja keras dengan cara meminta-minta, maka hal seperti ini dapat melanggengkan aktivitas mengemis.

C. Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah mengenai Konstruksi Budaya Kemiskinan Dalam Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung antara lain:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perilaku menggelandang dan mengemis di Kota Bandung?
2. Bagaimana proses adanya budaya kemiskinan pada gelandangan dan pengemis di Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian mengenai diatas, mengenai Konstruksi Budaya Kemiskinan Dalam Fenomena Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung bertujuan:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perilaku menggelandang dan mengemis di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui proses adanya budaya kemiskinan pada gelandangan dan pengemis di Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap disiplin ilmu pengetahuan terutama Sosiologi Pembangunan.
 - b. Sebagai referensi untuk evaluasi mengenai fenomena Gelandangan dan Pengemis yang ada di Kota Bandung.
2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan apabila dilakukan penelitian yang serupa atau sama di masa yang akan datang, khususnya penelitian mengenai fenomena Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung.
 - b. Memperoleh informasi atau gambaran jelas mengenai fenomena Gelandangan dan Pengemis di Kota Bandung.
 - c. Sebagai kajian bagi pemerintah dalam merancang dan melakukan program penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, khususnya pemangku kebijakan yang menaungi Kota Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Ketika seseorang hidup dalam pengangguran, mungkin menginspirasi mereka untuk melakukan hal-hal seperti menjadi gelandangan dan pengemis untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mengemis merupakan tindakan seorang individu atau kelompok yang bertujuan untuk mengumpulkan uang dengan cara meminta belas kasihan orang lain dengan berjalan kaki dari toko ke toko, di setiap persimpangan lampu merah, di tempat keramaian (pasar) dan di mana pun mereka bisa datang guna mendapatkan uang dengan cara meminta-minta.

Menurut teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, objektifikasi adalah transformasi kesadaran menjadi tindakan. Artinya suatu nilai yang dianut oleh seorang individu dalam masyarakat pada akhirnya menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan sehingga menyadarkan akan tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut. Seorang gelandangan atau pengemis sadar akan pekerjaan yang dilakukannya, maknanya bahwa lingkungan merupakan salah satu bentuk kesadaran yang dilakukan masyarakat terhadap praktik pekerjaan mengemis yang dilakukannya (Sari, 2016).

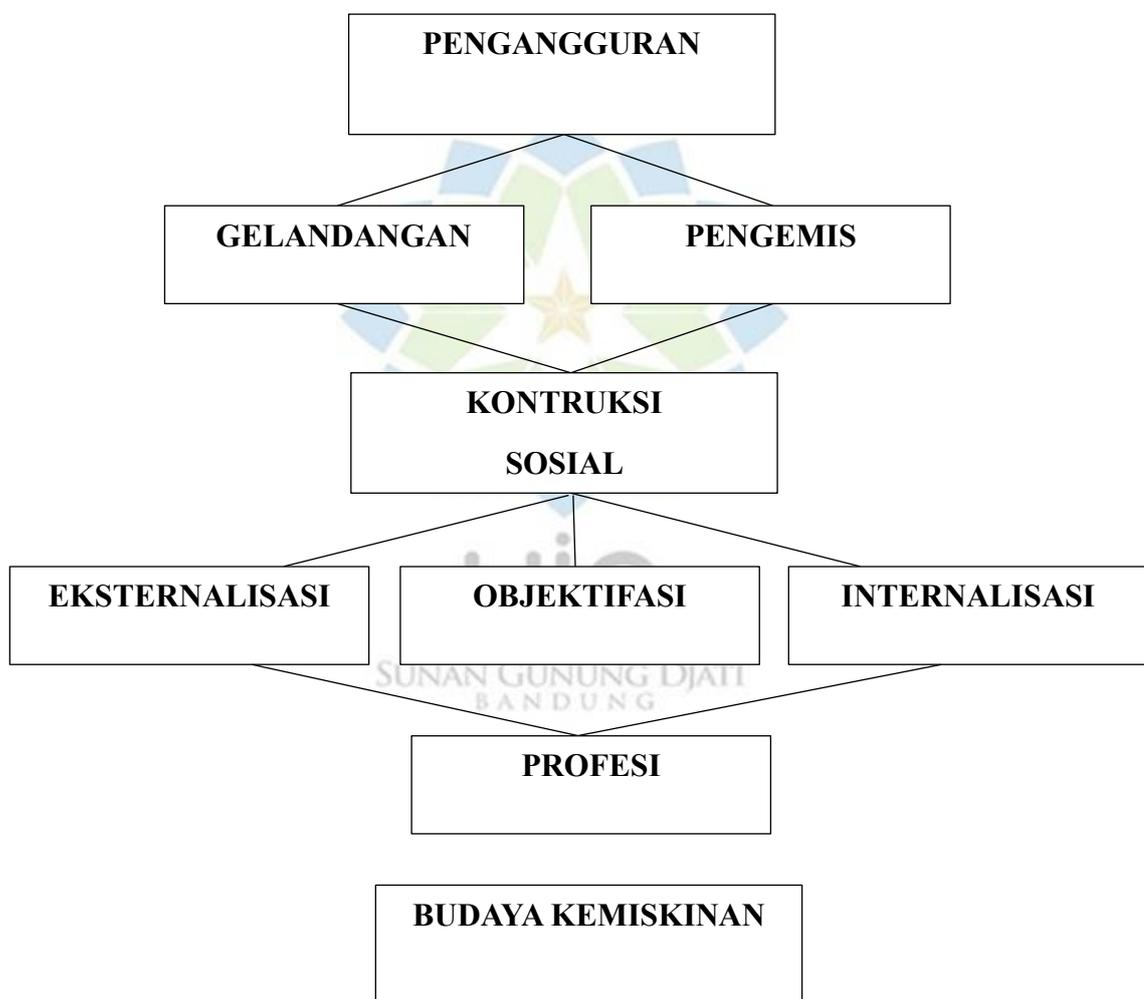
Tidak hanya lingkungan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam keluarga dan pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara mengemis tanpa mengeluarkan banyak biaya serta keahlian khusus dalam melakukannya juga dianggap sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan masyarakat. Selain karena kehendak bebasnya sendiri, lingkungan sosial, keluarga, dan kebiasaan yang mereka jalani juga dapat berdampak pada cara para gelandangan dan pengemis melakukan tindakannya. Akibatnya, sikap mental mereka dalam menjalankan

pekerjaan sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki rasa malu dan terus melakukannya demi mendapatkan uang dari apa yang mereka lakukan. Tak bisa dipungkiri, sebagian besar dari mereka mengandalkannya sebagai sumber penghasilan, bahkan bagi sebagian pengemis, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Mereka memilih mengemis karena terlalu malas untuk melakukan pekerjaan baik dan ingin menambah uang dengan cepat dan mudah (Sari, 2016).

Sejak mengemis menjadi bagian dari budaya, budaya kemiskinan muncul di kalangan gelandangan dan pengemis. Budaya kemiskinan mengacu pada suatu bentuk kemiskinan yang tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi tetapi juga pada kekurangan dalam susunan budaya dan psikologis individu atau komunitas, yang dapat menyebabkan kecenderungan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kecenderungan ini memiliki ciri-ciri tersebut antara lain tidak produktif, tidak kreatif, tidak menabung, dan menggantungkan hidupnya pada orang lain. Budaya kemiskinan, sebagaimana didefinisikan oleh Lewis, adalah cara terbaik untuk hidup dalam situasi ini (Sudi, 2017).

Fenomena gelandangan dan pengemis yang mulai dijadikan sebagai profesi normal oleh sebagian orang ini menjadikan budaya meminta-minta mulai menjalar disudut-sudut kota besar khususnya Kota Bandung. Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui teori konstruksi sosial menjelaskan bahwa tindakan tersebut terkonstruksi dengan baik sehingga menjadi hal yang normal bahkan kebiasaan dikalangan gelandangan dan pengemis, realita mengemis menjadi suatu hal yang normal menurut gelandangan dan pengemis.

Dengan normalisasi kegiatan meminta-minta ini maka lahirlah kemiskinan kultural yakni bentuk kemiskinan yang tidak hanya didasarkan pada faktor ekonomi tetapi juga pada kekurangan dalam susunan budaya dan psikologis individu atau komunitas, yang dapat menyebabkan kecenderungan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir